

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan aset adalah salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas operasional suatu organisasi (Indrajit & Djokopranoto, 2020). Aset yang dikelola dengan baik dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas organisasi. Sebaliknya, Manajemen aset yang tidak dikelola dengan maksimal berisiko memicu beragam kendala, mulai dari ketidakakuratan data, hilangnya aset fisik, hingga munculnya potensi kerugian finansial bagi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan aset yang terstruktur dan terintegrasi agar pengelolaan aset dapat berjalan secara efektif dan efisien (Indrajit & Djokopranoto, 2020).

Organisasi XYZ Kota Semarang, sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kebutuhan operasional tinggi, melaksanakan pengelolaan aset melalui Bagian Pengelolaan Aset. Unit ini bertanggung jawab penuh dalam mengoordinasikan siklus hidup aset, mencakup perencanaan pengadaan, kegiatan inventarisasi, hingga prosedur penghapusan aset. Bagian Pengelolaan Aset memiliki peran strategis dalam mengelola seluruh siklus hidup aset agar aset dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kegiatan organisasi.

Berdasarkan informasi dan hasil observasi yang diperoleh dari Bagian Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota Semarang, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset masih terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset. Pada Subbagian

Perancangan dan Pengadaan, permasalahan yang ditemukan antara lain keterlambatan pekerjaan proyek akibat kendala yang dialami rekanan atau vendor, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, serta adanya potensi temuan administratif maupun laporan dari pihak eksternal terkait proses pengadaan. Selain itu, pada beberapa pekerjaan konstruksi masih ditemukan hasil pekerjaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga memerlukan perbaikan maupun pekerjaan ulang sebelum dapat diserahkan.

Permasalahan yang diidentifikasi pada Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset meliputi ketidaksinkronan data inventaris dengan keberadaan fisik aset di lapangan, serta belum diperbaruinya informasi sistem terkait perpindahan atau mutasi aset, serta adanya aset yang belum dapat diverifikasi keberadaannya saat kegiatan inventarisasi dilakukan. Selain itu, masih terdapat aset tanah yang menghadapi kendala administrasi dan legalitas sehingga berpotensi menimbulkan sengketa aset. Pada proses penghapusan aset juga ditemukan permasalahan berupa aset rusak yang belum berhasil dilelang serta penumpukan barang rongsok akibat lamanya proses penghapusan aset.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan pengelolaan aset memiliki potensi risiko yang dapat memengaruhi efektivitas operasional organisasi. Menurut Hopkin (2018), manajemen risiko memegang peranan krusial dalam proses pengelolaan aset guna meminimalisir dampak buruk yang dapat menghambat pencapaian target organisasi. Guna mengelola ketidakpastian tersebut secara sistematis, diperlukan sebuah panduan berstandar

global seperti ISO 31000:2018, yang menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses tata kelola risiko yang adaptif serta terintegrasi dengan tujuan institusi. Penerapannya berfungsi sebagai langkah strategis dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai, hingga memitigasi segala potensi risiko yang mungkin muncul.

Dalam upaya mengatasi berbagai jenis risiko operasional, finansial, hukum, dan administrasi dalam pengelolaan aset tersebut, penulisan ini menerapkan standar internasional ISO 31000:2018 sebagai basis panduan utamanya. ISO 31000:2018 merupakan sebuah panduan manajemen risiko berstandar global yang menyediakan prinsip, kerangka kerja, serta proses yang sistematis untuk mengelola ketidakpastian di berbagai sektor organisasi. Alasan utama pemilihan standar ISO 31000:2018 dalam penulisan ini adalah sifatnya yang sangat fleksibel dan adaptif, sehingga dapat diselaraskan dengan mudah pada karakteristik tata kelola aset di Organisasi XYZ Kota Semarang. Selain itu, fokus utama dari ISO 31000:2018 adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai organisasi, di mana hal tersebut sangat sejalan dengan esensi utama manajemen logistik, yaitu menjaga nilai fisik, administratif, serta fungsional aset dari potensi kerugian atau kehilangan.

Lebih lanjut, standar ISO 31000:2018 dipilih karena memiliki siklus penilaian risiko yang sangat runtut dan logis mulai dari tahap identifikasi, analisis, hingga evaluasi risiko. Karakteristik proses yang terstruktur ini mempermudah penulis untuk memetakan prioritas masalah di lapangan secara objektif. Melalui pendekatan tersebut, strategi mitigasi yang dirancang tidak hanya berhenti sebagai rekomendasi teoretis, melainkan dapat ditransformasikan secara nyata ke dalam

bentuk rancangan diagram alir operasional baru guna mendorong adanya perbaikan berkelanjutan pada sistem pengendalian internal perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penulis mengidentifikasi adanya perbedaan signifikan antara situasi aktual dan target yang diinginkan dalam pengelolaan aset. Rincian mengenai kesenjangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Data GAP Penulisan Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota

Semarang Tahun 2026

No	Identifikasi Permasalahan Pengelolaan Aset	Kondisi Aktual	Standar yang Diharapkan	Kesenjangan Waktu Pelaksanaan (<i>Timeline Gap</i>)	Dampak Yang Ditimbulkan
1	Keterlambatan penyelesaian proyek fisik akibat keterbatasan kompetensi dan manajemen operasional pihak vendor.	Dari total 18 paket pekerjaan konstruksi yang berjalan, terdapat 3 paket pekerjaan (16,7%) yang mengalami keterlambatan penyelesaian akibat kegagalan koordinasi material dan tenaga kerja oleh pihak ketiga.	100% paket pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai dengan timeline dan durasi waktu yang disepakati di dalam kontrak kerja (0% keterlambatan)	Deviasi waktu pelaksanaan berupa keterlambatan penyelesaian pada 3 paket pekerjaan (16,7% dari total target) terhadap baseline schedule.	Menghambat pemanfaatan aset baru dan mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional institusi.
2	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis materiil/barang yang dikirim oleh pihak ketiga dengan dokumen Purchase Order (PO).	Terdeteksi 2 kasus (~11%) ketidaksesuaian spesifikasi (tipe barang dan penurunan kualitas mutu) dari total 18 paket pengadaan barang yang direalisasikan.	Seluruh komoditas barang yang dikirim vendor harus 100% presisi (0% defect/mismatch) mengacu pada dokumen rincian spesifikasi	Terjadi deviasi pemenuhan spesifikasi teknis pada 2 paket pengadaan (~11%), sehingga memicu proses retur	Menurunkan efektivitas penggunaan aset serta menunda distribusi barang ke unit kerja pengguna.

			teknis awal.	dan klarifikasi ulang administrasi.	
3	Potensi ketidakpatuhan atau celah administratif dalam berkas dokumen prosedur pengadaan barang dan jasa.	Ditemukan 1 temuan administratif kritis berupa ketidaklengkapan berkas dokumen pendukung pada pengadaan bernilai besar yang memerlukan revisi total.	Pemenuhan regulasi pengadaan mencapai 100% tertib administrasi (zero non-compliance) sesuai ketentuan internal dan hukum yang berlaku.	Defisit kepatuhan dokumen pengadaan sebanyak 1 berkas administratif yang belum memenuhi standar kelengkapan dokumen regulasi.	Berpotensi menimbulkan temuan audit kepatuhan oleh auditor eksternal dan risiko hukum.
4	Hasil pekerjaan konstruksi fisik di lapangan tidak presisi mengikuti detail gambar kerja rencana teknis awal.	Pada evaluasi proyek tahun 2025, ditemukan beberapa titik pekerjaan fisik bangunan yang tidak presisi, sehingga memerlukan tindakan perkuatan teknis khusus.	Kualitas hasil pengerjaan konstruksi fisik 100% identik dengan gambar kerja teknis dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).	Adanya deviasi deviasi kualitas fisik bangunan pada beberapa area konstruksi yang menyimpan g dari gambar teknis resmi.	Menambah alokasi biaya perbaikan tak terduga serta memperpanjang waktu pelaksanaan pengerjaan proyek.
5	Terjadinya kegagalan mutu struktur konstruksi yang mengharuskan tindakan pembongkaran total fisik proyek.	Adanya instruksi pembongkaran ulang dari pengawas lapangan terhadap bagian struktur tertentu setelah proses pemeriksaan karena terbukti menyimpang dari standar keamanan materiil.	Seluruh pengerjaan fisik proyek dapat diterima secara langsung pada tahap pemeriksaan pertama tanpa catatan kritis pembongkaran (0% rework).	Terjadinya pemborosan operasional (waste) berupa pembongkaran fisik pada struktur bangunan yang gagal memenuhi ambang batas kualitas teknis.	Menimbulkan pemborosan biaya pengadaan material baru, efisiensi waktu, dan penurunan produktivitas tenaga kerja.

6	Inakurasi data administratif pada database buku inventaris sistem informasi aset dengan kondisi fisik aktual.	Dari total 320 unit aset yang diperiksa secara sampling, terdapat 18 aset (5,6%) yang memiliki data administratif (deskripsi/status) tidak sinkron dan memerlukan penyesuaian.	Akurasi pencatatan database aset mencapai 100% valid dan sinkron antara sistem informasi (SIMAK BMU) dengan kondisi fisik di lapangan.	Ketidakakuratan data pencatatan inventaris sebesar 5,6% (18 unit aset dari 320 unit) yang belum diperbarui di dalam sistem.	Menimbulkan ketidakakuratan pada pelaporan aset tahunan organisasi serta memicu catatan temuan audit.
7	Perbedaan lokasi riil penempatan fisik aset di lapangan dengan data lokasi yang terdaftar di sistem inventaris.	Dari total 320 unit aset yang diinventarisasi, ditemukan 15 aset (4,7%) berada di ruangan/unit kerja berbeda tanpa adanya pelaporan mutasi resmi.	Kesesuaian posisi tata letak fisik aset tetap di lapangan mencapai 100% valid sesuai data Kartu Inventaris Ruang (KIR) di sistem.	Ketidaksesuaian lokasi fisik penempatan aset sebesar 4,7% (15 unit aset) akibat adanya perpindahan internal tanpa pelaporan administrasi mutasi barang.	Menyulitkan jalannya proses monitoring, pelacakan, dan pengendalian aset secara periodik.
8	Keterbatasan atau kendala legalitas formal administratif atas hak kepemilikan aset tetap berupa tanah.	Terdapat 1 bidang tanah milik organisasi yang status hukumnya masih tertahan dalam proses penyelesaian kelengkapan dokumen dan sertifikasi kepemilikan.	Seluruh aset tetap tanah milik organisasi 100% berstatus clear and clean dengan sertifikat hak milik/pakai hukum yang sah.	Keterbatasan legalitas hukum pada 1 bidang tanah yang belum mengantongi sertifikasi kepemilikan formal yang lengkap.	Berpotensi memicu sengketa batas lahan dengan pihak eksternal serta menghambat optimalisasi pemanfaatan aset.
9	Kegagalan eksekusi penjualan atau pelelangan aset tetap yang telah masuk dalam kategori rusak	Pada pelelangan sisa tahun 2025, sejumlah aset rusak tidak mendapatkan penawaran sama sekali dari pihak	Tingkat pembersihan (disposal clearance rate) aset rusak melalui mekanisme	Adanya sejumlah aset rusak hasil sisa lelang tahun 2025 yang gagal	Menyebabkan stagnasi kapasitas gudang serta mempercepat penurunan nilai

	berat/rongsok.	ketiga, sehingga barang tertahan di area penyimpanan.	lelang mencapai 100% tuntas sesuai dengan jadwal penghapusan tahunan.	dialihkan dan statusnya masih membebani ruang penyimpanan gudang.	ekonomis (depreciation) sisa barang.
10	Kehilangan kontrol fisik yang mengakibatkan aset tetap tidak dapat diverifikasi keberadaannya saat stock opname.	Dari total 320 unit aset yang diverifikasi, terdapat 6 aset (1,9%) yang status fisik barangnya hilang atau tidak dapat ditemukan di seluruh area kerja.	Tingkat keterlacakkan (traceability rate) fisik aset mencapai 100% (0% kasus kehilangan aset saat proses inventarisasi dilakukan).	Defisit keberadaan fisik aset sebesar 1,9% (6 unit aset dari 320 unit) yang status fisiknya tidak dapat diverifikasi (untraceable).	Meningkatkan risiko kerugian finansial akibat kehilangan aset serta memicu inakurasi laporan posisi keuangan.
11	Akumulasi bottleneck material scrap (barang rongsok) akibat lambatnya siklus birokrasi prosedur penghapusan.	Terjadi penumpukan sebanyak 45 unit aset rusak di gudang logistik karena tertahan oleh proses administrasi otorisasi penghapusan yang memakan waktu lama.	<i>Lead time</i> proses penghapusan aset dari status rusak hingga eliminasi fisik maksimal selesai sesuai jadwal periodik (0 unit penumpukan sisa).	Terjadinya penumpukan operasional berupa pengendapan 45 unit material rongsok di gudang akibat siklus birokrasi penghapusan aset (disposal process) yang terlalu lama.	Mengurangi kapasitas area penyimpanan efektif gudang serta mengganggu estetika dan efektivitas pengelolaan operasional gudang.

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil observasi, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1, ditemukan berbagai masalah dalam pengelolaan aset Organisasi XYZ Kota Semarang yang berpotensi menghambat efisiensi operasional. Pada proses pengadaan, masih ditemukan keterlambatan penyelesaian

pekerjaan akibat kendala vendor, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima, temuan administratif pada dokumen pengadaan, serta hasil pekerjaan konstruksi yang belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga memerlukan perbaikan maupun pekerjaan ulang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pengadaan masih memiliki risiko yang dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, dan kesesuaian hasil pengadaan dengan kebutuhan organisasi.

Selain itu, pada proses inventarisasi aset masih ditemukan ketidaksesuaian antara data inventaris dengan kondisi aset di lapangan, perbedaan lokasi aset dengan data inventaris, serta aset yang belum dapat diverifikasi keberadaannya. Pada aspek legalitas aset, masih terdapat aset tanah yang menghadapi kendala administrasi dan status hukum. Sementara itu, pada proses penghapusan aset ditemukan permasalahan berupa aset rusak yang belum berhasil dilelang serta penumpukan barang rongsok akibat lamanya proses penghapusan aset. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar ideal dalam pengelolaan aset berisiko memicu inefisiensi, ketidakakuratan data, temuan audit, hambatan operasional, hingga kerugian organisasi. Guna memitigasi hal tersebut, manajemen risiko perlu diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menentukan langkah pengendalian yang tepat atas setiap risiko yang muncul.

Melalui pengumpulan data serta observasi empiris di lingkungan Organisasi XYZ, ditemukan adanya indikasi hambatan dalam prosedur pengelolaan aset yang berpotensi menjadi faktor penghambat bagi pencapaian target operasional organisasi. Secara umum, berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan tersebut

dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis risiko utama, yaitu risiko operasional yang mengganggu proses pengadaan dan konstruksi, risiko keuangan akibat penurunan nilai ekonomis barang, risiko hukum terkait sengketa legalitas tanah, serta risiko administrasi akibat tidak tertibnya pencatatan data inventaris aset. Pengelompokan jenis risiko ini diperlukan agar organisasi dapat mengidentifikasi akar masalah secara terstruktur. Guna memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan identifikasi risiko secara sistematis yang disusun berdasarkan prioritas permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Melalui pengumpulan data serta observasi empiris di lingkungan Organisasi XYZ, ditemukan adanya indikasi hambatan dalam prosedur pengelolaan aset yang berpotensi menjadi faktor penghambat bagi pencapaian target operasional organisasi. Guna memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, berikut disajikan identifikasi risiko secara sistematis yang disusun berdasarkan prioritas permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Tabel 1.2 Identifikasi Risiko Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota Semarang Tahun 2026

No	Divisi Bagian	Jenis Risiko	Identifikasi Risiko	Standar Kejadian yang Diharapkan	Dampak yang Ditimbulkan
1		Teknis	Risiko keterlambatan penyelesaian pengerjaan proyek konstruksi fisik oleh pihak ketiga (<i>vendor</i>).	Proyek selesai sesuai jadwal dan spesifikasi yang telah ditetapkan	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan terganggunya operasional
2		Operasional	Spesifikasi barang yang diterima tidak	Barang diterima sesuai spesifikasi	Gangguan operasional dan

			sesuai	pengadaan	ketidaksesuaian penggunaan barang
3	Pengadaan	Hukum dan Kepatuhan	Adanya laporan dari pihak eksternal terkait pengadaan yang tidak sesuai	Seluruh proses pengadaan berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	Risiko temuan audit, permasalahan hukum, dan penurunan reputasi organisasi
4		Teknis	Pekerjaan konstruksi tidak sesuai spesifikasi sehingga memerlukan perkuatan	Hasil pekerjaan konstruksi sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan	Penambahan biaya dan waktu pekerjaan
5		Teknis	Adanya pembongkaran ulang pekerjaan konstruksi	Hasil pekerjaan dapat diterima tanpa perbaikan ulang	Keterlambatan penyelesaian proyek dan pemborosan sumber daya
6	Inventarisasi	Administratif	Adanya temuan audit terkait pencatatan aset	Data aset tercatat secara akurat dan sesuai kondisi aktual	Ketidaksesuaian laporan aset dan temuan audit
7		Administratif	Barang di lapangan tidak sesuai dengan pencatatan inventaris	Data inventaris sesuai dengan kondisi aset di lapangan	Kesulitan pengendalian aset dan ketidakakuratan data inventaris
8		Hukum dan Kepatuhan	Adanya sengketa terhadap aset tanah	Seluruh aset memiliki legalitas dan status kepemilikan yang jelas	Risiko kehilangan hak penguasaan aset dan permasalahan hukum
9		Operasional	Adanya aset yang tidak ditemukan di lapangan	Seluruh aset dapat ditelusuri keberadaannya	Risiko kehilangan aset dan terganggunya pengendalian

					aset
10	Penghapusan	Finansial	Penjualan aset rusak/rongsok tidak laku atau tidak ada yang menawar	Aset yang dihapuskan dapat dilepas sesuai mekanisme yang berlaku	Penumpukan aset rusak dan berkurangnya nilai ekonomis aset
11		Operasional	Penumpukan barang rongsok akibat proses penghapusan aset terlalu lama	Proses penghapusan aset berjalan tepat waktu	Gangguan pemanfaatan ruang penyimpanan dan inefisiensi operasional

Sumber: Data diolah penulis berdasarkan hasil observasi, 2026

Berbagai risiko yang telah diidentifikasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara awal, teridentifikasi sejumlah hambatan operasional, berbagai permasalahan dan risiko dalam pengelolaan aset Organisasi XYZ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah belum maksimalnya pelaksanaan sistem yang ada pengawasan terhadap vendor dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, belum adanya prosedur yang secara khusus mengatur pelaksanaan inventarisasi aset secara berkala, serta belum optimalnya pengendalian pada proses penghapusan aset dan pengelolaan barang rongsok. Selain itu, meskipun ORGANISASI XYZ KOTA SEMARANG telah memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur kegiatan pengadaan, pencatatan aset, dan penghapusan aset, masih terdapat beberapa aktivitas yang memerlukan penguatan prosedur pengendalian agar risiko yang muncul dapat diminimalkan secara lebih efektif. Risiko yang tidak tertangani dengan efektif dapat memicu penurunan efisiensi dan produktivitas secara

signifikan efektivitas pengelolaan aset serta meningkatkan potensi kerugian bagi organisasi. Menurut David Hillson (2017), risiko yang dibiarkan tanpa penanganan memadai berisiko mengganggu keberhasilan target organisasi serta memicu kerugian, baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kajian manajemen risiko secara menyeluruh yang mencakup identifikasi, analisis, hingga evaluasi terhadap setiap hambatan dalam pengelolaan aset. Melalui langkah tersebut, organisasi dapat memetakan efektivitas pengelolaan risiko saat ini sekaligus merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna menekan potensi kerugian.

Menurut David Hillson (2017), risiko yang dibiarkan tanpa penanganan memadai berisiko mengganggu keberhasilan target organisasi serta memicu kerugian, baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kajian manajemen risiko secara menyeluruh yang mencakup identifikasi, analisis, hingga evaluasi terhadap setiap hambatan dalam pengelolaan aset. Kajian komprehensif ini mendesak untuk diselaraskan dengan kerangka kerja standar internasional ISO 31000:2018, guna memastikan rancangan mitigasi yang dihasilkan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) pada sistem pengendalian internal perusahaan. Melalui langkah tersebut, organisasi dapat memetakan efektivitas pengelolaan risiko saat ini sekaligus merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna menekan potensi kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Aset (Studi pada Bagian Pengelolaan Aset ORGANISASI XYZ KOTA SEMARANG)”** guna

mengetahui berbagai risiko yang terjadi serta bagaimana pengelolaan risiko tersebut dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset. Penulisan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai langkah mitigasi yang efektif terhadap risiko pada tahapan pengadaan, inventarisasi, hingga penghapusan aset.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja risiko yang terjadi dalam pengelolaan aset pada Bagian Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota Semarang?
2. Bagaimana tingkat risiko dalam pengelolaan aset pada Bagian Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota Semarang berdasarkan tingkat kemungkinan kejadian (*occurrence*) dan tingkat dampak (*severity*)?
3. Apa saja risiko yang menjadi prioritas penanganan dalam pengelolaan aset pada Bagian Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota Semarang?
4. Bagaimana usulan pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam pengelolaan aset pada Bagian Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terjadi dalam pengelolaan aset pada Bagian Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota

Semarang.

2. Untuk menganalisis tingkat risiko dalam pengelolaan aset pada Bagian Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota Semarang berdasarkan tingkat kemungkinan kejadian (*occurrence*) dan tingkat dampak (*severity*).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis risiko yang menjadi prioritas penanganan dalam pengelolaan aset pada Bagian Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota Semarang.
4. Untuk memberikan usulan pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam pengelolaan aset pada Bagian Pengelolaan Aset Organisasi XYZ Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Instansi: Menjadi bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, khususnya dalam pengendalian dan pengelolaan risiko pada proses pengadaan, inventarisasi, dan penghapusan aset, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan *Flowchart*.
2. Akademisi: Memberikan kontribusi empiris dalam kajian manajemen risiko berbasis ISO 31000, khususnya pada bidang pengelolaan aset.
3. Bagi Praktisi dan Industri: Menjadi rujukan bagi organisasi atau instansi sejenis dalam merancang pengendalian risiko pada pengelolaan aset serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengembangan prosedur kerja yang berbasis manajemen risiko.